

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pajak sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai 1,019,56 triliun atau 85,65% dan berpengaruh besar terhadap target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 yang Rp1,323,4 triliun, di samping itu pajak sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan belanja dituntut untuk terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan moneter dan kesempatan. Strategi ini diperlukan untuk membangun konsistensi dan memberikan kenyamanan bagi warga negara dalam memenuhi komitmen tugasnya sehingga pendapatan retribusi dapat diandalkan untuk meningkat. Tugas merupakan salah satu sumber kekayaan dan pendapatan negara yang bersifat fundamental bagi kepentingan dan kemajuan negara. Kerangka pemilahan biaya adalah suatu pendekatan untuk mengetahui berapa banyak kewajiban yang harus dibayar dengan menghitung jumlah yang harus dibayar oleh warga negara ke negara yang dia libatkan. Pemilahan tugas di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengatur dan mengatur segala sesuatu. identifikasi dengan subjek dan objek ketetapan pajak. Inti dari undang-

undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi Negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa Negara. Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut *self assessment system*, *Official Assessment System* dan *withholding system*, dimana sistem *self assessment* adalah merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri, *Official Assessment System* adalah sistem sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus, dan *withholding system* adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Ada banyak hal yang menjadi masalah ketika diberi wewenang untuk menentukan dan menghitung besar pajak yang terutang.

Organisasi merupakan salah satu subjek penilaian tahunan, lebih spesifiknya subjek tugas perusahaan. Subjek penilaian tahunan perusahaan mencakup semua

organisasi yang menyelesaikan latihan bisnis mereka di Indonesia. Suatu unsur tergantung pada komitmen untuk membayar tagihan atau dikenal sebagai subjek tugas tahunan dalam negeri ketika didirikan atau berdomisili atau mendapatkan bayaran di Indonesia. Kewajiban penilaian korporasi berakhir pada saat dirinci atau pada saat ini tidak berkedudukan di Indonesia. Setiap substansi bisnis diatur sebagai subjek penilaian tahunan perusahaan lokal. pada saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Ada pengecualian, khususnya unit kantor pemerintah yang memenuhi aturan berikut: Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Subsidi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pendapatan diingat untuk rencana pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah terdekat.
3. Buku-buku diperiksa oleh perangkat administrasi praktis negara.

Organisasi ketika mendapat atau memperoleh gaji akan mengubah status tugasnya menjadi warga negara dan akan tergantung pada pengeluaran pribadi. Klarifikasi UU no. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pengeluaran pribadi dibebankan pada subyek yang dibebankan atas bayaran yang diperoleh atau diperoleh pada tahun tugas. juga dapat dibebani pembayaran pada bagian tahun tugas, jika tanggung jawab pengeluaran abstrak dimulai atau berakhir pada tahun penilaian.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang menjelaskan

bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Menurut (Darmadi :2013) mengatakan bahwa tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, pasal (31E). Adapun banyak pajak yang harus dipungut, dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan yaitu PPH 21 (untuk karyawan), PPh 23, PPh 22 (jika perusahaan tersebut melakukan ekspor, impor), PPN, PPh pasal 4 ayat (2). Tidak sedikit perusahaan yang mengalami masalah dalam pembayaran pajak, baik dari pemahaman mengenai perpajakan, maupun masalah yang lain untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang di alami perusahaan dengan mengangkat judul tentang“ **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan Jasa Distributor di Surabaya**”

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai:

- a) Apakah sikap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?
- b) Apakah fasilitas perusahaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?
- c) Apakah kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?

- d) Apakah pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?

### **C Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?
- b) Menganalisis pengaruh fasilitas perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?
- c) Menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?
- d) Menganalisis pengaruh pemahaman dan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa distributor di Surabaya?

### **D Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat tugas akhir ini yaitu manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi program studi STIE Mahardika dan manfaat bagi masyarakat

#### **a) Aspek Akademis**

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai cara berkomunikasi dan strategi public relations

#### **b) Aspek pengembangan ilmu pengetahuan**

Eksplorasi ini dapat memperluas informasi dan pemahaman tentang model pembelajaran pembukuan dan pemungutan pajak, pada umumnya menambah

kemajuan ilmu pelatihan dan khususnya pada program studi pembukuan dan pemungutan pajak.

**c) Aspek praktis**

1. Untuk membantu dewan dalam mengerjakan kekuasaan internal atas siklus pendapatan, seperti halnya memberikan informasi atau usulan kepada para eksekutif tentang pengendalian batin yang telah dilakukan
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat dan bahan renungan yang berharga bagi organisasi terkait untuk mengetahui lebih jauh seberapa besar dampak perspektif, kantor, dana, pemahaman konsistensi warga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A **Gambaran Umum Perpajakan**

##### 1 **Definis Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Soemitro (2011:1) Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung yang bisa diperuntukkan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pengertian pajak Menurut Feldmann (2012:1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Organisasi ketika mendapat atau memperoleh gaji akan mengubah status tugasnya menjadi warga negara dan akan tergantung pada pengeluaran pribadi. Klarifikasi UU no. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pengeluaran pribadi dibebankan pada subyek yang dibebankan atas bayaran yang diperoleh atau diperoleh pada tahun tugas. juga dapat dibebani pembayaran pada bagian tahun tugas, jika tanggung jawab pengeluaran abstrak dimulai atau berakhir pada tahun penilaian.

Pengertian pajak Menurut Adriani (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi pajak dari UU maupun dari para ahli, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara terbesar dimana penghasilan tersebut berasal dari iuran dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa menurut aturan UU yang berlaku dengan tidak adanya timbal balik secara langsung kepada masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa aturan yang dapat dimanfaatkan oleh Negara sebagai aturan dalam memutuskan posisinya untuk memaksa tuduhan, khususnya untuk beban pengeluaran pribadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Thomas Sumarsan (2017:11) Aturan dasar yang sering dimanfaatkan oleh Negara sebagai alasan memaksa biaya adalah:

1. Patokan rumah (rule of home) Mengingat aturan ini, negara akan memaksakan pembebanan atas suatu bayaran yang diperoleh atau diperoleh oleh seseorang atau unsur, jika untuk tujuan pembebanan, orang tersebut adalah penduduk atau berdomisili di negara itu dan jika zat yang bersangkutan berdomisili di negara tersebut. itu. Dalam pengaturan pungutan paksa terhadap penduduk, ia akan menggabungkan aturan (rumah) dengan gagasan pemaksaan pungutan atas bayaran baik yang diperoleh di dalam negeri maupun bayaran yang diperoleh di luar negeri.
2. . Standar Sumber Negara-negara yang berpegang pada aturan sumber akan memaksakan biaya atas suatu bayaran yang diperoleh atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan khususnya jika bayaran yang akan dibebani itu diperoleh atau diperoleh orang atau unsur yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu
3. . Pedoman Kewarganegaraan (Standar Kewarganegaraan) Dalam aturan ini, alasan pembebanan biaya adalah status kewarganegaraan seseorang atau zat yang memperoleh bayaran.

### a) Jenis-jenis pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pajak menurut golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak penghasilan

#### a. Pajak Penghasilan

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bea Tahunan Pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek penilaian adalah bayaran, khususnya setiap kelebihan uang yang diperoleh atau diperoleh Warga Negara, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau perluasan kekayaan Warga Negara bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

#### b pajak tidak langsung

Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. Objek PPn diatur dalam pasal 4, pasal 16 C dan pasal 16D 1984. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU PPn 1984 tersebut diatur bahwa PPN dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

## 2. Pajak menurut sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

## 3. Pajak menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- c) Pajak Provinsi, terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan pajak Rokok
- d) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

## 2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengertian Wajib Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu :

1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan.

Contoh: Pegawai swasta, PNS.

2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh:

Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.

3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas.

Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final.

Contoh: sehubungan dengan pemodalannya seperti Bunga pinjaman, royalti.

5)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final.

Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.

6)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak.

Contoh: seperti bantuan sumbangan.

7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri.

Contoh: seperti bunga, royalty PPh

8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber.

Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, Perhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Hal-hal Umum Tata Kerja dan Tata Cara Pengeluaran. Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa penduduk adalah individu atau zat, termasuk penduduk, pemotong biaya, dan spesialis konsumsi, yang memiliki hak dan komitmen untuk membayar biaya sesuai dengan rencana permainan hukum dan aturan pelaksanaan. PNS tetapi membuka praktek dokter.

Perhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Hal-hal Umum Tata Kerja dan Tata Cara Pengeluaran. Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa penduduk adalah individu atau zat, termasuk penduduk, pemotong biaya, dan spesialis konsumsi, yang memiliki hak dan komitmen untuk membayar biaya sesuai dengan rencana permainan hukum dan aturan pelaksanaan.

### **3 Pengertian Badan**

Pengertian badan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### **4 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa subjek wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak yang dikenakan untuk Penghasilan yang telah diperoleh selama atau dalam jangka waktu satu tahun pajak atau pada bagian tahun pajak.

#### **5 Pajak Penghasilan final**

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikurangkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas(Direktorat Jenderal Pajak :2009):

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utag negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) .Penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) .Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal tertentu;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- 5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **6 Kepatuhan wajib pajak(Kepatuhan Pajak)**

Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2018). Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Konsistensi adalah jenis perilaku yang dapat dipengaruhi oleh komponen dalam dan luar. Konsistensi warga negara dapat dicirikan sebagai kondisi di mana warga negara memenuhi semua komitmen tugas dan kegiatan hak penilaiannya (Siti Kurnia Rahayu: 2010:138)Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Machfud Sidikdalam Siti Kurnia Rahayu :2010:19). Dengan demikian *Kepatuhan wajib pajak* dapat

didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan

Adapun jenis-jenis Kepatuhan wajib pajak Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Konsistensi Formal adalah keadaan dimana warga negara memenuhi komitmennya secara resmi sesuai dengan pengaturan undang-undang kewajiban. Misalnya, menyerahkan formulir Penilaian Pribadi (SPT) benar atau tidak. Menariknya, formulir Personal Assessment (SPT) sudah diserahkan sebelum tanggal 31.

2. Konsistensi material adalah kondisi dimana Warga Negara secara signifikan memenuhi semua pengaturan material dari pemungutan pajak, khususnya sesuai dengan substansi dan jiwa dari undang-undang pengeluaran. Konsistensi material juga dapat menggabungkan konsistensi konvensional. Di sini Warga khawatir, sekaligus memusatkan perhatian pada realitas sejati dari substansi dan sifat dari Bentuk Pemerintahan Pribadi (SPT). Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 langkah-langkah konsistensi warga adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak (Siti Kurnia Rahayu 2010:139) yaitu:

- I. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- II. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

## **7 Kondisi Keuangan**

Kondisi moneter adalah kondisi yang mengacu pada sumber daya, kewajiban, dan posisi nilai organisasi pada satu titik sesuai jadwal. Keadaan moneter suatu organisasi akan diketahui dari rangkuman anggaran organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan laporan anggaran. Sesuai Harahap (2013: 105) laporan anggaran menggambarkan kondisi moneter dan konsekuensi dari kegiatan suatu organisasi pada waktu atau kerangka waktu tertentu. Jenis-jenis ringkasan anggaran yang biasa dikenal adalah laporan akuntansi, pengumuman gaji atau konsekuensi tugas, artikulasi pendapatan, penjelasan perubahan posisi moneter. Makna laporan fiskal menurut (Pendirian Pembukuan Indonesia: 2015) dalam Norma Pembukuan Moneter (SAK) No. 1 menyatakan bahwa ringkasan fiskal sangat penting untuk interaksi pengungkapan moneter dan laporan anggaran adalah pertunjukan terorganisir dari posisi moneter dan pelaksanaan moneter dari sebuah elemen. Ringkasan anggaran yang lengkap biasanya mencakup catatan keuangan, artikulasi pembayaran, pengumuman perubahan posisi moneter (yang dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, misalnya, sebagai penjelasan pendapatan, atau pernyataan pendapatan), catatan dan laporan lain dan ilustrasi. materi yang merupakan bagian dasar dari laporan anggaran. . Selain itu, ini juga mencakup rencana dan data tambahan yang diidentifikasi dalam laporan, misalnya, data moneter pada bagian industri dan geografis seperti paparan dampak perubahan biaya. Sesuai Farid dan Susanto (2011; 2) "ringkasan anggaran adalah data yang diperlukan untuk memiliki opsi untuk memberikan bantuan kepada klien untuk menyelesaikan pilihan moneter yang bersifat moneter".

Ringkasan anggaran adalah pertunjukan terorganisir dari posisi moneter dan

pelaksanaan moneter suatu substansi. Alasan ringkasan anggaran adalah untuk memberikan data tentang posisi moneter, pelaksanaan moneter, dan pendapatan suatu zat yang berguna bagi sebagian besar klien laporan fiskal dalam menentukan pilihan keuangan (22-23 November 2016)

Menurut Harahap (2013: 106) jenis-jenis ringkasan anggaran organisasi yang menjadi data utama bagi klien laporan fiskal adalah catatan keuangan dan keuntungan dan kerugian. Berikutnya adalah klarifikasi laporan akuntansi dan manfaat dan kemalangan:

a) Neraca

Laporan akuntansi atau disebut juga posisi moneter menggambarkan situasi keuangan organisasi pada tanggal tertentu, sering disebut menurut tanggal tertentu, misalnya per 31 Desember 2001. Posisi yang digambarkan dibagi menjadi dua posisi, yaitu sisi biaya. untuk sumber daya dan sisi kredit untuk kewajiban (Harahap, 2011: 209).). Belum ditentukan lembaran ada pengaturan, khususnya:

I. (Sumber Daya) PSAK mencirikan "Sumber daya adalah keuntungan moneter yang diperoleh atau dikendalikan di masa depan oleh yayasan tertentu karena pertukaran yang pada dasarnya". Sumber daya ini terdiri dari tiga bagian, khususnya:

a) Aset Lancar

Aset lancar merupakan kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dijual, ditagih atau digunakan selama satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Adapun contoh dari aset lancar yaitu: kas, piutang usaha/dagang, persediaan, perlengkapan, peralatan kantor, biaya dibayar dimuka. Dalam penyusunan aset lancar harus didasarkan pada likuiditasnya, yaitu kemampuan aset untuk diubah menjadi kas.

(b) Aset Tetap

Sumber daya tetap adalah sumber daya yang tidak salah lagi diperoleh untuk

digunakan dalam kegiatan organisasi di mana keberadaan yang bermanfaat dari sumber daya ini lebih dari satu tahun, dengan pengecualian tanah yang rusak. Contoh sumber daya tetap adalah: perangkat keras, kendaraan, struktur, peralatan.

(c) Aset Tak Berwujud

Sumber daya teoretis adalah sumber daya yang diperoleh untuk digunakan dalam latihan kerja organisasi. Perbedaan penting antara properti, pabrik dan peralatan dan sumber daya teoretis adalah fisik dan kehidupan berharga yang dapat diperoleh organisasi. Di mana sumber daya yang sulit dipahami tidak memiliki struktur aktual dan keberadaan sumber daya yang bermanfaat ini adalah dengan alasan bahwa mereka tidak yakin.

I. Liabilitas (Kewajiban) Menurut Harahap (2012 : 211) menyatakan kewajiban adalah jumlah yang harus dipindahkan setiap tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Liabilitas terdiri dari dua bagian yaitu kewajiban 15 lancar dan kewajiban jangka panjang serta modal pemilik.

a) Kewajiban Lancar

Kewajiban lancar A dapat disebut risiko lancar jika dalam satu tahun dapat diselesaikan sejak tanggal penetapan posisi moneter atau pola kerja biasa organisasi. Misalnya, hutang pertukaran dan kredit bank (perkembangan kurang dari satu tahun).

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Tanggung jawab yang ditarik jika penyelesaian yang dinilai lebih dari satu tahun sejak tanggal penetapan posisi moneter. Modelnya adalah hutang obligasi dan kredit bank.

II. Modal Pemilik

Modal pemilik merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas

#### b) Laba rugi

Laba rugi adalah sebuah laporan terperinci mengenai seluruh pendapatan dan biaya untuk mengetahui laba rugi yang diterima perusahaan selama periode tertentu. Adapun unsur-unsur dalam laporan laba rugi menurut (Harahap, 2013 : 241) antara lain:

##### 1) Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari penawaran tenaga kerja dan produk yang dibebankan kepada klien yang mendapatkan administrasi.

##### 2) Beban

Biaya adalah lonjakan kas dari sumber daya atau pengembangan kewajiban selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman produk atau pelaksanaan yang berbeda dari pendapatan organisasi yang didorong, yang dapat menjadi turunan dari pembayaran.

##### 3) Laba/Rugi

Manfaat/kemalangan adalah kontras antara pendapatan dan biaya kerja absolut untuk periode tersebut. Jika hal yang penting itu positif, maka akan mendatangkan keuntungan, sedangkan jika hal yang penting itu negatif, maka akan mendatangkan kemalangan kerja. Mengingat PSAK/Proklamasi Pedoman Pembukuan Moneter menetapkan lima jenis ringkasan anggaran:

1. Artikulasi pembayaran digunakan untuk melihat apakah organisasi telah membuat keuntungan atau kemalangan dalam periode tertentu.

2. Laporan perubahan modal digunakan untuk melihat apakah modal organisasi bertambah atau berkurang dalam periode tertentu.
3. Laporan akuntansi digunakan untuk menentukan ukuran sumber daya, kewajiban, dan modal organisasi dalam periode tertentu.
4. Penjelasan pendapatan digunakan untuk mengetahui berapa banyak uang organisasi bertambah atau berkurang dalam periode tertentu.
5. Catatan atas rangkuman fiskal digunakan untuk menjelaskan secara mendalam atau merinci kondisi organisasi.

## **8 Fasilitas Perusahaan**

Perkantoran adalah segala sesuatu yang terdapat dalam organisasi yang dilibatkan dan diapresiasi oleh perwakilan baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Untuk situasi ini, administrasi organisasi harus mempertimbangkan untuk mengatur kantor-kantor yang tepat untuk perwakilan yang bekerja untuk organisasi. Kemudian, kantor kerja yang dapat menentukan tempat kerja pekerja adalah:

1. Perangkat keras kerja kantor Merupakan alat atau benda yang dapat langsung digunakan dalam interaksi penciptaan. Dalam pekerjaan sehari-hari seorang pekerja tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa menggunakan alat kerja. Misalnya, perangkat dan mesin kreasi.
2. Kantor pemenuhan pekerjaan Adalah semua barang atau barang yang digunakan dalam mengurus pekerjaan. Perlengkapan kantor ini berfungsi sebagai fasilitator dan pelengkap hanya sebagai aparatur dalam bekerja. Misalnya, PC, mesin ketik manual, alat tulis, telepon, meja, kursi dan lain-lain.

3. Kantor sosial Adalah kantor yang diberikan oleh organisasi untuk kepentingan administrasi bagi pekerja dalam kegiatan sehari-hari yang memiliki kapasitas sosial. Kantor sosial di dalam organisasi biasanya dapat berupa administrasi makanan dan minuman, toilet, wadah, tempat cinta, pengaturan kantor kesehatan.

Kantor-kantor yang diberikan oleh organisasi diharuskan untuk memastikan bahwa Expense Compliance akan dapat memperkenalkan setiap informasi yang diperlukan untuk dinamika di bidang penilaian pajak. Kantor organisasi dapat mengurangi kerentanan untuk Duty Consistent dan dapat memastikan bahwa mereka memiliki semua informasi yang diharapkan untuk menentukan pilihan detail yang terpelajar.

## **9 Sikap Kepatuhan wajib pajak**

Menurut Notoatmodjo ( 2012) Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehabat sakit dan factor resiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain. Sikap di definisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau suatu situasi. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan, pertimbangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik menguntungkan atau tidak mengenai obyek

Sementara menurut Azwar (2013) sikap dapat dikategorikan kedalam tiga orientasi pemikiran, yaitu :

a) Berorientasi pada respon Orientasi ini diwakili oleh para ahli seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Dalam pandangan mereka, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Secara lebih operasional sikap terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau

tidak memihak (*unfavorable*) terhadap objek tersebut.

b) Berorientasi pada kesiapan respon Orientasi ini diwakili oleh para ahli seperti Chave, Bogardus, LaPierre, Mead, dan Allport. Konsepsi yang mereka ajukan ternyata lebih kompleks. Menurut pandangan orientasi ini, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek dengan cara-cara tertentu.

c) Berorientasi pada skema triadic Menurut pandangan orientasi ini, sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu. Sikap didefinisikan sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*), pemikiran (*kognisi*) dan predisposisi tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek lingkungan sekitarnya.

Pengukuran sikap secara ilmiah dapat diukur, dimana sikap terhadap objek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran sikap adalah metode Self Report dan Pengukuran Involuntary Behavior :

a) Observasi Perilaku Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu.

b) Penanyaan Langsung Individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri, ia akan mengungkapkan secara terbuka apa yang dirasakannya.

c) Pengungkapan Langsung Pengungkapan secara tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan item tunggal yaitu member tanda setuju atau tidak setuju, maupun menggunakan item ganda yang dirancang untuk mengungkapkan perasaan yang berkaitan dengan suatu objek sikap.

d) Skala Sikap Skala sikap berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai

suatu objek sikap. Dari respon subjek pada setiap pernyataan kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang.

e) Pengukuran Terselubung Metode pengukuran terselubung objek pengamatannya bukan lagi perilaku tampak yang disadari atau disengaja dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi diluar kendali orang berangkutan (Azwar, 2013).

Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak dapat memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Menurut exchange theory (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Menurut hasil penelitian Rahajeng dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel sikap rasional terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Novitasari (2007) menyebutkan bahwa sikap rasional tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

## **10 Pemahaman**

Menurut Widiaworo (2017: 81) bahwa "Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi "satu gambar" yang utuh di otak kita". Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya.

Dalam penelitian (Suryadi:2006 dalam Hardiningsih 2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak

postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto 2006) dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

## B Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Putri Aprilliyana (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wpop samsat kota surakarta	1) tariff pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  2) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  3) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

		wajib pajak kendaraan bermotor
Pertiwi Kundalini (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015	Hasil Penelitian dari 101 responden, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sama besarnya dengan nilai alpha(0,000)
Susi Dwi Mulyani (2020)	Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat	(1) variabel tingkat pelayanan fiskus, preferensi risiko dan pemahaman peraturan pajak

	<p>Kepatuhan wajib pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur.</p> <p>(2) variabel sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur.</p> <p>(3) demikian juga dengan variabel modernisasi preferensi risiko sebagai variabel moderating terhadap sikap rasional, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan</p>
--	---	--

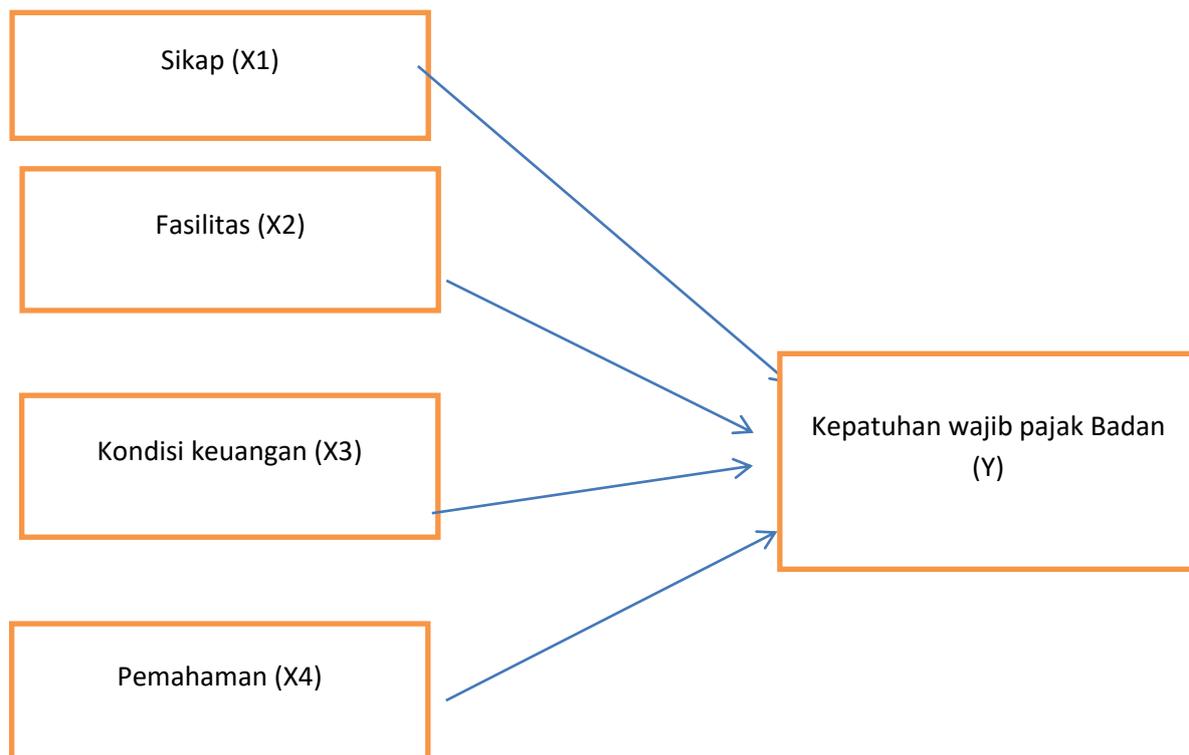
		<p>wajib pajak pada KPP tangerang timur.</p> <p>(4) untuk hasil uji R-Square menyatakan bahwa tingkat Kepatuhan wajib pajak pada KPP tangerang timur sebesar 57.1% dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel pelayanan fiskus, preferensi risiko pemahaman peraturan pajak.</p>
--	--	--

Sumber : Diolah Penulis

### **C Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak badan. Gambar 21 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak badan sedangkan variable independennya yaitu sikap, keuangan, fasilitas dan pemahaman



Gambar 2:1 Kerangka konseptual

1. Ho: Tidak ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap sikap wajib pajak  
Ha: Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap sikap wajib pajak
2. Ho: Tidak Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap fasilitas wajib pajak  
Ha: Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap fasilitas wajib pajak
3. Ho: Tidak Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kondisi keuangan wajib pajak  
Ha: Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kondisi keuangan wajib pajak
4. Ho: Tidak Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemahaman wajib pajak  
Ha: Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemahaman wajib pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian survei dimana penelitian melakukan survei dengan mengedarkan kuesoner kepada perusahaan badan jasa distributor di Surabaya.

#### **B Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada perusahaan ditributor di Surabaya. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal 01 juli sampai dengan 15 agustus.

#### **C Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari para responden penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi para responden.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalnya data hasil kuesioner.

## b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian

## D Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono2016:135). Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja diperusahaan jasa distributor di Surabaya yang berstatus sebagai staf Pajak. Alasan pemilihan staf pajak ini adalah (1) staf pajak merupakan wajib pajak yang dianggap lebih mengetahui tentang peraturan perpajakan dan penyusunan laporan keuangan badan, (2) staf pajak lebih mengetahui pengaruh apa saja yang berada di perusahaannya yang membuat wajib pajak badan tersebut tidak mematuhi pajak (3) pembayaran pajak menggunakan bantuan staf pajak untuk berbagai macam alasan, antara lain untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya, staf pajak juga bisa meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan karena untuk staf pajak yang bisa membuat laporan keuangan maka bisa membuat atau meminimumkan biaya-biaya sehingga pembayaran pajak dapat di kecilkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Internet, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menjual produk dari indonetwork sumber <https://www.indonetwork.co.id/s/jawa-timur/k/mesin/perusahaa>.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Quota sampling*. *Quota sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi,

kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Pada *quota sample* banyaknya sampel yang ditetapkan itu hanya sekedar perkiraan akan relatif memadai untuk mendapatkan data yang di perlukan yang diperkirakan dapat mencerminkan populasinya

## **F Definisi Operasional Variabel**

Arti penting dari suatu variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel dinilai atau merupakan suatu metode yang diselesaikan dalam suatu pengujian. Untuk melihat pergerakan suatu variabel, maka harus dinilai dengan menggunakan pointer yang kemudian akan dapat menjelaskan variabel tersebut. Faktor investigasi pada dasarnya adalah segala sesuatu dalam setiap desain yang dibuat oleh para ahli untuk dipusatkan sehingga informasi diperoleh tentangnya, kemudian, dihilangkan (Sugiyono 2017:38). Dalam pengujian ini, 2 komponen tidak terlalu ditentukan, khususnya variabel bebas atau otonom (X) dan variabel terikat atau alami (Y). Self-governing atau faktor otonom (X) "adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau perkembangan variabel terikat (terikat)". (Sugiyono 2017:39). Menurut spekulasi pada masing-masing faktor, signifikansi petunjuk untuk masing-masing faktor dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1) Sikap (X1)

Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat/sakit dan factor resiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2012). Sikap merupakan suatu tindakan, seorang yang cenderung ingin melakukan sikap positif maka akan mematuhi aturan, seseorang memiliki sikap positif

untuk kepatuhan pajak akan melakukan Kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya jika seseorang memiliki sikap negative//tidak melakukan Kepatuhan wajib pajak maka akan tidak mealukan kepatuhan pajak. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1)Jujur dalam menyampaikan nominal bayar pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak
- 2)Menyampaikan data laporan berdasarkan data dan informasi yang ada dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak
- 3) Tepat waktu dalam pelaporan perpajakan dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak
- 4) Sikap untuk mematuhi perpajakan dari menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak

#### 1. Fasilitas (X2)

Jabatan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam organisasi yang dilibatkan dan diapresiasi oleh perwakilan baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Kantor mempengaruhi presentasi seseorang, dengan asumsi kantor dapat diterima, pekerja dapat membuat laporan keuangan dengan tepat dan cepat sehingga tidak ada penundaan perhitungan, pembayaran dan penilaian mengungkapkan, semua hal dipertimbangkan, organisasi yang memiliki kantor total akan memuaskan konsistensi warganya. Pointer tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerangka data dapat mempengaruhi konsistensi warga
- 2) Perangkat keras kantor dapat memengaruhi konsistensi warga
- 3) Metode transportasi dapat mempengaruhi audit ringkasan anggaran.

#### 4) Kondisi Keuangan (X3)

Kondisi keuangan adalah kondisi yang merujuk pada satu asset, liabilitas dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Kondisi yang merujuk pada aset, liabilitas yang merujuk pada besarnya utang perpajakannya, dan kondisi keuangan perusahaan baik maka akan mematuhi Kepatuhan wajib pajaknya. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- 1) Laba yang diperoleh dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak
- 2) Kondisi arus kas terakhir dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak
- 3) Kondisi laba sebelum pajak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak

#### 2. Pemahaman (X4)

Menurut Widiasworo (2017:81) bahwa "Memahami adalah kemampuan" untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi yang dipelajari menjadi suatu "gambaran" lengkap di otak kita. Dapat juga dikatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi lain yang telah tersimpan dalam database di otak kita sebelumnya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan, dan jika tingkat pengetahuan wajib pajak rendah, semakin besar wajib pajak melanggar peraturan, indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman pedoman penilaian mempengaruhi konsistensi warga
- 2) Pemahaman tentang tingkat penilaian mempengaruhi konsistensi warga
- 3) Pemahaman pedoman penilaian melalui kelas mempengaruhi konsistensi warga

Variabel terikat atau dependen (Y) "Merupakan Variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Sugiyono (2017:39).

#### 1 Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah tempat di mana warga negara memenuhi komitmen pengeluarannya dan kegiatan hak pengumpulan pajaknya secara tepat dan akurat sesuai dengan undang-undang kewajiban material. wardani (2017). Memenuhi komitmen biaya sesuai pedoman terkait, Membayar beban sesuai jadwal, Memenuhi persyaratan dan melunasi biaya, Warga dapat mengetahui tanggal jatuh tempo angsuran. Pointer tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konsistensi warga dalam memastikan, membayar dan mengumumkan biaya yang harus dibayar sesuai jadwal
- 2) Konsistensi warga dalam mengumpulkan dan mengungkapkan pengeluaran pihak luar adalah benar dan nyaman
- 3) Konsistensi warga dalam memastikan, membayar dan mengumumkan SPT secara akurat dan tepat waktu
- 4) Konsistensi warga negara dalam menyetujui beban hukum

### **G Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan polling. Survei adalah ikhtisar pertanyaan yang harus dijawab dan dibulatkan oleh responden. Jajak pendapat eksplorasi ini disampaikan kepada organisasi bantuan grosir yang digunakan sebagai tes ujian.

### **H Analisis data**

Analisis dan merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini menggunakan analisi penelitian adalah

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23 dari windows, penelitian menggunakan alat analisis regresi linier berganda karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

a) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data. Sedangkan statistik inferensia bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median dan penyimpangan baku dari masing-masing variabel penelitian.

b) Uji reliabilitas dan validitas

a) Uji reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:130) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Menurut Sugiarto dan Situnjuk (2006), uji reliabilitas (*reliability*) adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu.

b) Validitas

Menurut Zaenal Arifin (2012) Validitas adalah suatu derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Menurut Sukardi

(2013) validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan Menurut Saifuddin Azwar (2014) validitas mengacu sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

#### c) Uji asumsi klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linie berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan Nonparametric Test One Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

##### b) Uji Multikolinieritas :

Mengharapkan untuk menguji apakah ada hubungan antara faktor bebas dalam model kekambuhan. Model relaps yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antara faktor otonom. Alasan dinamis dalam uji multikolinearitas dapat diambil dua. Pertama dengan melihat nilai Ketahanan. dengan asumsi nilai resistansi  $> 0.10$ , tidak terjadi multikolinearitas, bagaimanapun jika nilai ketahanan  $< 0.10$ , terjadi multikolinearitas. Yang kedua tergantung pada harga VIF. dengan asumsi nilai  $VIF < 10,00$  tidak terjadi multikolinearitas, maka pada saat itu lagi dengan asumsi nilai  $VIF > 10,00$  terjadi multikolinearitas.

#### c) Uji Heteroskedastitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan Glejser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Namun sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas. Asumsi yang baik dalam model regresi adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### d) Uji Autokolerasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t_1$  sebelumnya, dengan menggunakan rumus Durbin Waston. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, jika nilai  $d < d_l$  atau  $d > 4 - d_l$  maka disimpulkan terdapat autokorelasi. Jika nilai  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Dan jika nilai  $d_l < d < d_u$  atau  $4 - d_u < d < 4 - d_l$  maka tidak ada kesimpulan pasti.

#### e) Uji statistik deskriptif

Berencana untuk menguji dan mengklarifikasi kualitas contoh yang diperhatikan. Konsekuensi dari tes terukur yang mencerahkan diperhatikan, mean, standar deviasi,

terbesar dan terkecil, yang kemudian diikuti oleh klarifikasi sebagai penjelasan yang memperjelas pemahaman tentang substansi tabel.

f) Uji Ketepatan/ Keberartian Model (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linear berganda sudah tepat (fit). Kriteria pengujiannya yaitu : apabila nilai signifikan > taraf signifikan 5% atau 0,05, maka model yang diformulasikan dalam uji pengaruh Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Sikap (X1), Fasilitas (X2), Kondisi keuangan (X3) dan Pemahaman (X4) pada Kepatuhan wajib pajak (Y) dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat.

g) Uji Signifikan Variabel (uji t)

Bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Kriteria pengujian apabila nilai signifikan < taraf signifikan 5% atau 0,05, maka H<sub>a</sub> diterima (ada pengaruh yang signifikan) . Apabila nilai signifikan > taraf signifikan 5% atau 0,05 maka H<sub>a</sub> diterima (tidak ada pengaruh yang signifikan). Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Sikap (X1), Fasilitas (X2), Kondisi keuangan (X3) dan Pemahaman (X4) pada Kepatuhan wajib pajak (Y)

## I Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Alasan penggunaan analisis linear berganda adalah karena cocok untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan distributor di Surabaya. Model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

$\alpha$  =Konstanta

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Sikap

X2 = Fasilitas

X3 = Kondisi Keuangan

X4 = Pemahaman

$\beta$ = Koefisien regresi

$\epsilon$ =eror

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1 Staff Tax Professional

Jumlah penduduk dalam eksplorasi ini adalah perwakilan yang bekerja di organisasi-organisasi di Surabaya dengan situasi dengan staf yang bertanggung jawab. Prosedur pemeriksaan dalam penyidikan ini menggunakan uji Porsi. Pengujian standar adalah strategi pemeriksaan dengan menetapkan angka tertentu sebagai tujuan yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan dari masyarakat (terutama yang tidak terbatas atau tidak jelas), kemudian, pada titik itu dengan tolok ukur angka tersebut analisis mengambil contoh. sewenang-wenang selama memenuhi kebutuhan sebagai contoh dari masyarakat. Akibatnya, contoh dalam penyelidikan ini adalah warga negara yang telah bekerja di organisasinya selama minimal 1 tahun dan telah memiliki SPT. Berikutnya adalah jumlah tes di setiap lokal.

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian

Surabaya Barat	Surabaya Timur	Surabaya Selatan	Surabaya Pusat
5	5	7	8

Sumber : Diolah penulis

## B Data Penelitian

Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja diperusahaan di Surabaya yang berstatus sebagai staf Pajak.

### 1 Jawaban Responden

#### a) Jawaban Responden terhadap Variabel Sikap (X1)

Berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel Sikap (X1) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jawaban Responden Variabel Sikap (X1)

No	Pernyataan	1	2	3	4	Mean
		STS	TS	S	SS	
1	Jujur dalam menyampaikan nominal bayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	-	1	20	4	3.12
2	Membuat atau menyampaikan data laporan berdasarkan data dan informasi yang ada dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	3	13	9	3.24
3	Tepat waktu dalam pelaporan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	1	12	12	3.44
4	Sikap untuk mematuhi perpajakan dari menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	2	10	13	3.44

Sumber : Diolah penulis

Pada tabel 4.2 diatas yang menunjukkan nilai jawaban responden terhadap item pernyataan variabel Sikap menunjukan, bahwa nilai rata-rata jawaban responden yang tinggi adalah pada item pernyataan ketiga dan empat yaitu tentang ketepatan waktu pembayaran dan kepatuhan menghitung, membayar, dan melaporkan.

#### **b) Jawaban Responden terhadap Variabel Fasilitas (X2)**

Berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel Fasilitas (X2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Jawaban Responden Variabel Fasilitas (X2)

No	Pernyataan	1	2	3	4	Mean
		STS	TS	S	SS	
1	Sistem informasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	2	11	12	3.40
2	Perlengkapan kantor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	2	4	14	5	2.88
3	Alat transportasi dapat mempengaruhi dalam mengkaji laporan keuangan	1	3	10	11	3.24

Sumber : Diolah penulis

Pada tabel 4.3 diatas yang menunjukkan nilai jawaban responden terhadap item pernyataan variabel Fasilitas menunjukan, bahwa nilai rata-rata jawaban

responden paling tinggi adalah pada item pernyataan pertama yaitu tentang sistem informasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### c) Jawaban Responden terhadap Variabel Kondisi Keuangan (X3)

Berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel Kondisi Keuangan (X3) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Jawaban Responden Variabel Kondisi Keuangan (X3)

No	Pernyataan	1	2	3	4	Mean
		STS	TS	S	SS	
1	Laba yang diperoleh dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	1	3	12	9	3.16
2	Kondisi arus kas terakhir dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	4	15	6	3.08
3	Kondisi laba sebelum pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	4	12	9	3.20

Sumber : Diolah penulis

Pada tabel 4.2 di atas, yang menunjukkan nilai tanggapan responden terhadap hal artikulasi variabel Mentalitas, menunjukkan bahwa nilai normal jawaban tinggi responden terdapat pada hal penjelasan ketiga dan keempat, khususnya tentang idealisme angsuran dan konsistensi dengan menghitung, membayar, dan mengumumkan.

**d) Jawaban Responden terhadap Variabel Pemahaman (X4)**

Berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel Kondisi Keuangan (X3) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Jawaban Responden Variabel Pemahaman (X4)

No	Pernyataan	1	2	3	4	Mean
		STS	TS	S	SS	
1	Pemahaman peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	1	11	13	3.48
2	Pemahaman tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	3	11	11	3.32
3	Pemahaman tentang peraturan pajak melalui seminar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	-	3	13	9	3.24

Sumber : Dioah penulis

Pada tabel 4.5 diatas yang menunjukkan nilai jawaban responden terhadap item pernyataan variabel Kondisi Keuangan menunjukkan, bahwa nilai rata-rata jawaban responden paling tinggi adalah pada item pernyataan pertama yaitu tentang pemahaman peraturan peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**e) Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	1	2	3	4	Mean
		STS	TS	S	SS	
1	Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu	-	2	16	7	3.20
2	Kepatuhan wajib pajak dalam memungut dan melaporkan pajak pihak ketiga benar dan tepat waktu	-	2	18	5	3.12
3	Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPT nya secara benar dan tepat waktu	-	2	12	11	3.36
4	Kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang perpajakan	-	-	8	17	3.68

Sumber : Diolah penulis

Pada tabel 4.6 di atas, yang menunjukkan nilai tanggapan responden terhadap hal penegasan variabel Konsistensi Warga, menunjukkan bahwa nilai

normal jawaban responden terbesar adalah pada hal penjelasan keempat, yaitu tentang konsistensi warga dalam menyetujui beban hukum.

## C Hasil Penelitian

### 1 Uji Validitas

Uji legitimasi dalam penelitian digunakan untuk menguji hal-hal penegasan dalam survei, dan untuk menentukan kemampuan mengukur informasi di lapangan. Untuk melihat apakah hal-hal penegasan dalam penelitian ini sah atau tidak, digunakan uji legitimasi untuk mengetahuinya. Untuk sementara, untuk mengukur legitimasi dapat menggunakan pemeriksaan nilai  $r$  ditentukan dan  $r$  tabel. Berikutnya adalah kelas yang digunakan untuk menguji legitimasi:

- 1) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, penjelasannya dianggap substansial
- 2) Dengan asumsi  $r$  cek  $<$   $r$  tabel, proklamasi seharusnya tidak valid

Selanjutnya adalah  $r$  yang ditentukan dari hasil persiapan SPSS 21 dengan melihat tabel Pearson Corellation yang telah diurutkan menjadi tabel sebagai berikut:

#### a) Uji Validitas Variabel Sikap (X1)

Tabel 4.7

Uji Validitas Variabel Sikap (X1)

Item Pernyataan	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
X1.1	0.689	0.4132	Valid
X1.2	0.882	0.4132	Valid
X1.3	0.886	0.4132	Valid

<b>X1.4</b>	<b>0.860</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>
-------------	--------------	---------------	--------------

Sumber : Lampiran Output SPSS 21

Tabel 4.7 uji legitimasi pada variabel Mentalitas (X1) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih menonjol daripada nilai r tabel yang bernilai 0,4132, yang menyiratkan bahwa semua hal pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sah atau layak digunakan untuk mengukur informasi dalam penelitian ini. Tabel 4.7 uji legitimasi pada variabel Sikap (X1) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih penting daripada nilai r tabel yang bernilai 0,4132, yang menyiratkan bahwa semua hal pernyataan yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan substansial atau cocok digunakan untuk mengukur informasi dalam penyelidikan ini.

#### **b) Uji Validitas Variabel Fasilitas (X2)**

Tabel 4.8

Uji Validitas Variabel Fasilitas (X2)

<b>Item Pernyataan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
<b>X2.1</b>	<b>0.810</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>
<b>X2.2</b>	<b>0.754</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>
<b>X2.3</b>	<b>0.897</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>

Sumber : Lampiran Output SPSS 21

Tabel 4.8 uji legitimasi pada variabel Office (X2) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih penting daripada nilai r tabel yang bernilai 0,4132, artinya semua

hal pernyataan yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan sah atau layak digunakan untuk mengukur informasi dalam penelitian ini. Tabel 4.8 uji legitimasi pada variabel Office (X2) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih menonjol daripada nilai r tabel yang bernilai 0,4132, menyiratkan bahwa semua hal pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini diucapkan substansial atau tepat untuk digunakan untuk mengukur informasi dalam penyelidikan ini.

**c) Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan (X3)**

Tabel 4.9

Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan (X3)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0.920	0.4132	Valid
X3.2	0.944	0.4132	Valid
X3.3	0.845	0.4132	Valid

Sumber : Lampiran Hasil Output SPSS 21

Tabel 4.9 menguji keabsahan variabel Kondisi Moneter (X3) menunjukkan nilai r cek lebih penting daripada nilai r tabel yang nilainya 0,4132, artinya semua pernyataan yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan substansial atau layak untuk digunakan untuk mengukur informasi dalam penyelidikan ini.

**d) Uji Validitas Variabel Pemahaman (X4)**

Tabel 4.10

Uji Validitas Variabel Pemahaman (X4)

<b>Item Pernyataan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
<b>X4.1</b>	<b>0.930</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>
<b>X4.2</b>	<b>0.795</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>
<b>X4.3</b>	<b>0.831</b>	<b>0.4132</b>	<b>Valid</b>

Sumber : Lampiran Hasil Output SPSS 21

Tabel 4.10 uji legitimasi pada variabel Mendapatkan (X4) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih penting daripada nilai r tabel yang nilainya 0,4132, yang menyiratkan bahwa semua hal pernyataan yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan substansial atau layak digunakan untuk mengukur informasi dalam penyelidikan ini.

e) **Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Tabel 4.11

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0.930	0.4132	Valid
Y2	0.888	0.4132	Valid
Y3	0.928	0.4132	Valid
Y4	0.756	0.4132	Valid

Sumber : Lampiran Hasil Output SPSS 21

Tabel 4.11 uji legitimasi pada variabel Citizen Consistence (Y) menunjukkan nilai r yang ditentukan lebih menonjol daripada nilai r tabel yaitu 0,4132, yang menyiratkan bahwa semua hal pernyataan yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan sah atau layak digunakan untuk mengukur informasi dalam penyelidikan ini.

## 2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan ketepatan dan ketepatan alat-alat penaksir yang digunakan dalam suatu pengujian. Alat penduga dapat dikatakan tepat atau presisi dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* hasil yang dihasilkan dari uji kualitas tak tergoyahkan menggunakan SPSS 21. Nilai *Cronbach Alpha* dapat dikatakan dapat diandalkan jika lebih dari 0,60 . Berikutnya adalah efek samping dari informasi SPSS 21 yang mempersiapkan uji ketergantungan:

Tabel 4.12

## Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
<b>Sikap (X1)</b>	0.850	0.60	Reliabel
<b>Fasilitas (X2)</b>	0.749		Reliabel
<b>Kondisi Keuangan (X3)</b>	0.881		Reliabel
<b>Pemahaman (X4)</b>	0.802		Reliabel
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	0.900		Reliabel

Sumber : Lampiran Output SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji reliabilitas pada data penelitian ini, menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* untuk keempat variabel lebih besar dari 0.060, artinya bahwa semua variabel reliabel.

## 2 Uji Asumsi Klasik

### A Uji Normalitas

Uji keteraturan dalam ujian ini digunakan untuk memutuskan apakah informasi yang didapat biasanya tersebar atau tidak. Informasi yang bagus akan membentuk apresiasi yang khas, dalam meninjau informasi eksplorasi yang beredar secara teratur atau tidak dapat menggunakan salah satu contoh uji Kolmogorov Smirnov pada SPSS 21, standar yang menyertainya dapat digunakan untuk memutuskan apakah informasi tersebut biasanya disebarluaskan atau tidak:

a) Sebuah. Dengan asumsi nilai Asym.sig (2-diikuti) > alpha ( $\alpha = 0,05$ ) disimpulkan bahwa informasi tersebut biasanya disesuaikan

b) Dengan asumsi nilai Asym.sig (2-followed) < alpha ( $\alpha = 0,05$ ), disimpulkan bahwa informasi tersebut biasanya tidak disesuaikan.

Berikut adalah akibat dari penyusunan informasi dengan menggunakan SPSS 21 untuk menguji kewajaran informasi pemeriksaan ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardiz ed Residual
N		25
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,27242611
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,117
	Absolute Negative	,117
	Positive	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		,587
Asymp. Sig. (2-tailed)		,881

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Output SPSS 21

Dari hasil penyiapan informasi pada tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa Asym-sig (2-followed) insentif untuk sisanya adalah 0,881 yang lebih menonjol dari

alpha 5%, sehingga cenderung beralasan bahwa semua informasi dari faktor-faktor yang dipertimbangkan mengikuti desain alat angkut yang khas. Ini menyiratkan bahwa anggapan gaya lama yang utama telah terpenuhi dan model tersebut masuk akal untuk digunakan sebagai perangkat investigasi informasi.

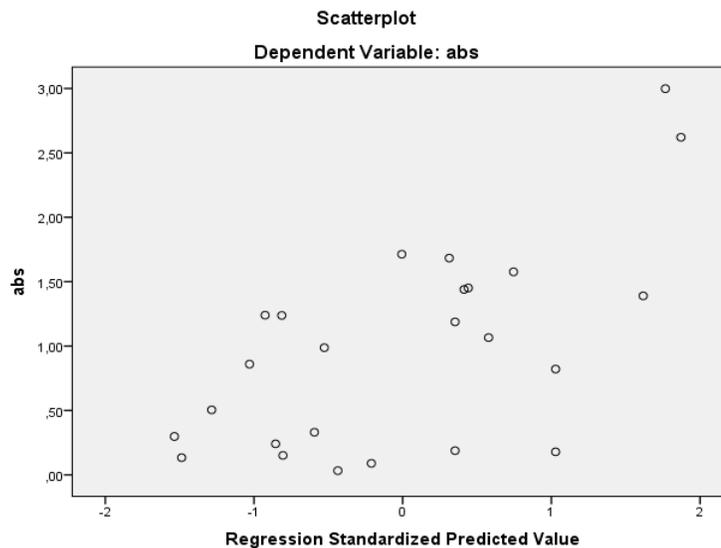
## **B Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas berarti menguji apakah dalam model relaps terdapat disparitas fluktuasi dari residual satu persepsi ke persepsi lainnya. Apabila perubahan yang menetap dimulai dari satu persepsi kemudian berlanjut ke persepsi berikutnya, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model relaps yang layak adalah unified dengan homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas. Teknik yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya manifestasi heteroskedastisitas adalah melalui diagram plot antara nilai antisipasi variabel terikat (Reliant) dan sisa (ZPRED) dengan standar sebagai berikut:

1. Jika penyebaran informasi sebagai bintik-bintik membentuk contoh tertentu dan standar, maka pada saat itu terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika penyebaran informasi sebagai bintik tidak membentuk contoh tertentu dan menyebar di atas dan di bawah hub Y, maka pada saat itu tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Berikutnya adalah akibat dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 21

Gambar 4.1  
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS 21

Dari Gambar 4.1 uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa fokus menyebar sewenang-wenang dan tidak membentuk contoh tertentu, menyiratkan bahwa konsekuensi dari informasi pemeriksaan ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas sehingga informasi eksplorasi ini dapat digunakan untuk uji regresi linier berganda dengan baik.

### C Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diharapkan dapat melihat apakah terdapat hubungan yang ideal antara faktor-faktor otonom dalam penyelidikan. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Toleransi dan VIF yang diperoleh dari konsekuensi penanganan informasi SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 4.14  
Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10,032	2,299		4,364	,000		
Sikap	-,772	,235	-,776	-3,285	,004	,380	2,633
Fasilitas	-,122	,163	-,118	-,751	,461	,852	1,174
Kondisi Keuangan	,616	,212	,610	2,909	,009	,481	2,079
Pemahaman	,887	,274	,746	3,236	,004	,398	2,510

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output SPSS 21

Dari tabel 4.14 akibat uji multikolinieritas menggunakan SPSS 21, menunjukkan bahwa nilai resiliensi lebih besar dari 0,10 dan harga VIF di bawah 10, maka dapat beralasan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas pada model relaps ini. penyelidikan.

**D Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk tujuan estimasi, dimana dalam model terdapat variabel terikat (terikat) dan variabel otonom (bebas). Analisa Regresi adalah analisis untuk linier antara variabel terikat dan faktor bebas. Dilihat dari penyajian informasi melalui program SPSS 21 menghasilkan information out[ut seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,032	2,299		4,364	,000
Sikap	-,772	,235	-,776	-3,285	,004
Fasilitas	-,122	,163	-,118	-,751	,461
Kondisi Keuangan	,616	,212	,610	2,909	,009
Pemahaman	,887	,274	,746	3,236	,004

Sumber : Hasil Output SPSS 21

Dari hasil uji regresi linier berganda diatas dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 10.032 - 0.772X_1 - 0.122X_2 + 0.616X_3 + 0.887X_4 + e$$

Nilai dari persamaan diatas dapat kita interpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai Konsistensi sebesar 10,032 menyiratkan bahwa jika variabel Disposisi (X1) dianggap bernilai 0, maka pada saat itu variabel Konsistensi Warga Negara (Y) bernilai positif sebesar 10,032. Nilai koefisien relaps variabel Disposisi (X1) adalah - 0,772, menyiratkan bahwa dengan asumsi variabel Sikap (X1) memiliki ekspansi dalam evaluasi 1, Konsistensi Warga (Y) akan berkurang sebesar - 0,772, koefisiennya negatif, menyiratkan bahwa ada hubungan negatif antara variabel Mentalitas (X1) dengan Konsistensi Warga (Y), semakin tinggi penilaian Mentalitas (X1) maka Konsistensi Warga (Y) akan semakin berkurang. Nilai konstanta sebesar 10.032 artinya jika variabel Fasilitas (X2) diibaratkan memiliki nilai 0, maka variabel Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) memiliki nilainya positif yaitu sebesar 10.032. Nilai koefisien regresi variabel Fasilitas (X2) sebesar -0.122, artinya jika variabel Fasilitas (X2) mengalami peningkatan penilaian sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0.235, koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel Fasilitas (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin tinggi penilaian terhadap variabel Fasilitas (X2), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan.

2. Nilai konstanta sebesar 10.032 artinya jika variabel Kondisi Keuangan (X3) diibaratkan memiliki nilai 0, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilainya positif yaitu sebesar 10.032. Nilai koefisien regresi variabel Kondisi Keuangan (X3) sebesar 0.616, artinya jika variabel Kondisi Keuangan (X3) mengalami peningkatan penilaian sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.616, koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan antara Kondisi Keuangan (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin tinggi penilaian terhadap variabel Kondisi Keuangan (X3), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan.
3. Nilai konstanta sebesar 10.032 artinya jika variabel Kondisi Keuangan (X3) diibaratkan memiliki nilai 0, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilainya positif yaitu sebesar 10.032. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman (X4) sebesar 0.887, artinya jika variabel Kondisi Keuangan (X4) mengalami peningkatan penilaian sebesar 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.887, koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan antara Pemahaman (X4) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y),

semakin tinggi penilaian terhadap variabel Pemahaman (X4), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami kenaikan.

#### **E Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien assurance ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kapasitas model dalam mengklarifikasi keragaman variabel dependen (Y), sedangkan sisanya diperjelas oleh berbagai faktor di luar model. Menurut Ghozali (2016: 187), kelemahan utama dari penggunaan koefisien kepastian biasanya adalah jumlah faktor bebas yang diingat untuk model. Setiap ekspansi satu faktor bebas, maka, pada saat itu  $R^2$  harus dibangun terlepas dari apakah variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Oleh karena itu, dalam pengujian ini nilai R Square digunakan untuk menilai model relaps terbaik. Selanjutnya adalah konsekuensi dari uji assurance melalui program SPSS 21. Koefisien assurance ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kapasitas model dalam mengklarifikasi keragaman variabel dependen (Y), sedangkan sisanya diperjelas oleh berbagai faktor di luar model. Menurut Ghozali (2016: 187), kelemahan utama dari penggunaan koefisien jaminan umumnya adalah jumlah faktor otonom yang diingat untuk model. Setiap ekspansi satu variabel otonom, maka, pada saat itu  $R^2$  harus berkembang terlepas dari apakah variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nilai R Square digunakan untuk menilai model relaps terbaik. Selanjutnya adalah hasil uji assurance melalui program SPSS 21

Tabel 4.16 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 <sup>a</sup>	,577	,492	1,39387

a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Fasilitas, Kondisi Keuangan, Sikap

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output SPSS 21

Tabel 4.16 akibat uji konfirmasi di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,577 yang berarti 57,7% dari faktor bebas, khususnya Perilaku (X1), Jabatan (X2), Kondisi Keuangan (X3), dan Pemahaman (X4) dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel-variabel tersebut. Konsistensi Penduduk (Y) . Sedangkan sisanya 42,3% dijelaskan oleh faktor bebas lainnya, di luar elemen independen yang digunakan dalam pengujian ini.

**Uji Hipotesis****1. Uji Parsial (Uji t)**

Uji pengukuran t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu faktor bebas/logis secara terpisah dalam memperjelas varietas bergantung. Dari akibat penanganan informasi melalui program SPSS 21 diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17

## Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,032	2,299		4,364	,000
1 Sikap	-,772	,235	-,776	-3,285	,004
Fasilitas	-,122	,163	-,118	-,751	,461
Kondisi Keuangan	,616	,212	,610	2,909	,009
Pemahaman	,887	,274	,746	3,236	,004

Sumber : Hasil Output SPSS 21

Tabel 4.17 hasil uji parsial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

**a. Sikap (X1)**

Nilai penting dari variabel Disposisi (X1) menunjukkan nilai 0,004, lebih sederhana dari 0,05, sangat baik dapat dianggap bahwa H0 ditolak dan H1 diakui, menyiratkan bahwa agak variabel Mentalitas (X1) mempengaruhi variabel Konsistensi Warga. (Y).

**b. Fasilitas (X2)**

Nilai kepentingan variabel Office (X2) menunjukkan nilai 0,461, lebih menonjol dari 0,05, cenderung disimpulkan bahwa H0 diakui dan H1 ditolak, menyiratkan bahwa sampai batas tertentu variabel Office (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Konsistensi Warga (Y).

**c. Kondisi Keuangan (X3)**

Nilai signifikansi variabel Kondisi Keuangan (X3) menunjukkan nilai sebesar 0.009, lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, artinya bahwa secara parsial variabel Kondisi Keuangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .

#### d. Kondisi Pemahaman (X4)

Nilai kepentingan variabel Mendapatkan (X4) menunjukkan nilai 0,004, lebih sederhana dari nilai 0,05, sangat baik dapat diduga bahwa H0 ditolak dan H1 diakui, menyiratkan bahwa variabel Mendapatkan (X4) berpengaruh signifikan variabel Konsistensi Warga (Y).

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Dari hasil pengolahan data melalui program SPSS didapat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18

Tabel Hasil Uji Simultan

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52,902	4	13,226	6,807	,001 <sup>b</sup>
	Residual	38,858	20	1,943		
	Total	91,760	24			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman, Fasilitas, Kondisi Keuangan, Sikap

Sumber : Hasil Output SPSS

Dilihat dari hasil perhitungan uji sinkron pada tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa F yang ditentukan sebesar 6.807 dan harga bunga sebesar 0.001b. Nilai F yang ditentukan (6.807) yang lebih menonjol dari F tabel (3,07) dan Sig F (0,001b) yang lebih kecil dari 5% (0,05) menunjukkan bahwa H1 diakui dan H0 ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel Mentalitas ( X1) , Perkantoran (X2), Kondisi Keuangan (X3), dan Pemahaman (X4) juga mempengaruhi variabel Resident Consistence (Y), sehingga model relaps dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak dari keempat faktor tersebut. telah dijelaskan di atas bersama-sama.

## **H. Pembahasan**

### **1. Pengaruh secara Parsial Variabel Sikap (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Konsekuensi dari percobaan yang tidak lengkap dari variabel Sikap (X1) menunjukkan nilai penting 0,004 yang lebih sederhana dari 0,05, sangat baik dapat dianggap bahwa H0 ditolak dan H1 diakui, menyiratkan bahwa variabel Mentalitas (X1) dalam pemeriksaan ini berpengaruh negatif terhadap Citizen Consistency (Y). Hal ini didukung oleh kepraktisan dalam pengungkapan dan konsistensi dari penghitungan, pembayaran, dan pengumuman.

Dalam laporan sebelumnya yang disutradarai oleh Susi Dwi Mulyani pada tahun 2020, hasilnya menunjukkan bahwa disposisi mempengaruhi tingkat konsistensi warga di KPP Tangerang Timur.

## **2. Pengaruh secara Parsial Variabel Fasilitas (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Efek samping dari uji fraksional variabel Office (X2) menunjukkan nilai kepentingan 0,461 yang lebih menonjol dari 0,05, cenderung dianggap bahwa H0 diakui dan H1 ditolak, menyiratkan bahwa variabel Office (X2) dalam hal ini investigasi tidak memiliki dampak kritis terhadap Citizen Consistence (Y).

Dalam laporan sebelumnya yang dipimpin oleh Susi Dwi Mulyani pada tahun 2020, hasilnya menunjukkan bahwa administrasi penilaian tidak mempengaruhi tingkat konsistensi warga di Kantor Beban Tangerang Timur.

## **3. Pengaruh secara Parsial Variabel Kondisi Keuangan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Hasil uji coba yang tidak lengkap dari variabel Kondisi Moneter (X3) menunjukkan makna 0,009 yang lebih sederhana dari 0,05, sangat baik dapat dianggap bahwa H0 ditolak dan H1 diakui, menyiratkan bahwa variabel Kondisi Moneter (X3) dalam investigasi ini secara signifikan mempengaruhi Citizen Consistence (Y)..

## **4. Pengaruh secara Parsial Variabel Pemahaman (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Hasil uji parsial variabel Pemahaman (X4) menunjukan signifikansi sebesar 0.004 lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa variabel Pemahaman (X4) pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini didukung adanya seminar guna menyampaikan pengetahuan tentang pajak.

**5. Pengaruh secara Simultan Variabel Sikap (X1), Fasilitas (X2), dan Kondisi Keuangan (X3), dan Pemahaman (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Hasil uji simultan pada penelitian ini menunjukkan nilai  $f$  hitung sebesar 6.807 lebih besar dari nilai  $f$  tabel sebesar 3.07, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Sikap (X1), Fasilitas (X2), Kondisi Keuangan (X3), dan Pemahaman (X4) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

